

Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Identification of Batusitanduk Urban Slum Area, Walenrang District, Luwu Regency

Andi Fathussalam Baharuddin

*Email: fathussalam09@gmail.com

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo

Diterima: 20 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah pengukuran dan analisis kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan data primer dan data sekunder yang kemudian dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa jenis kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah permukiman kumuh yang terletak di dataran dan termasuk dalam kategori sedang yang membutuhkan tindakan penanganan dan pengendalian secara komprehensif maupun berkelanjutan

Kata Kunci: Identifikasi, Kawasan Permukiman Kumuh, Luwu

ABSTRACT

This study aims to understand the types and levels of slums in the urban slum area of Batusitanduk, Walenrang District, Luwu Regency, South Sulawesi Province. The method used is quantitative and qualitative measurement and analysis through the approach of primary data and secondary data which are then explained in sentences that are relevant to the problem being studied. The results of the research data analysis show that the type of urban slum area in Batusitanduk, Walenrang District, Luwu Regency is a slum located on the plains and is included in the medium category which requires comprehensive and sustainable management and control measures

Keywords: Identification, Residential Areas, Luwu



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan, khususnya terkait dengan keberadaan kawasan permukiman kumuh (kumuh), diidentifikasi memerlukan penanganan dan pengendalian secara terus menerus (Wijaya, 2016). Dalam dinamika pembangunan kawasan menunjukkan dua fenomena yang berkembang yaitu, (a) perkembangan kawasan permukiman kumuh (slum dan squater) dan (b)

perkembangan kawasan permukiman yang terencana yang difasilitasi oleh pengembang. Kedua hal tersebut terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana serta berjalan sejajar dengan dinamika perkembangan dan penambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan populasi yang relatif tinggi karena urbanisasi yang mempengaruhi tingginya permintaan akan lahan untuk pembangunan area pemukiman dan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan (Noverina, 2017).

Pada umumnya penyebab munculnya kawasan pemukiman kumuh adalah urbanisasi penduduk perdesaan ke daerah perkotaan, kawasan perkotaan memiliki daya tarik yang sangat kuat, di tandai dengan berbagai masalah seperti munculnya kemiskinan perkotaan (Fikri *et al*, 2016). Dalam prosesnya kemudian berdampak pada situasi kawasan secara umum yang diidentifikasi akan memerlukan penanganan dari waktu ke waktu secara. Permukiman kumuh merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dengan tingkat permasalahan secara khusus dan keberadaannya perlu untuk mendapatkan penanganan secara spesifik, sosial, ekonomi dan sistem sarana dan prasarana (Amri, 2013). Pola penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh memerlukan kajian secara mendalam dalam rangka mengurangi dan mengatasi permasalahan kumuh secara umum (Sulaiman, 2021).

Permasalahan permukiman kumuh salah satu isu utama yang cukup rumit, baik dari sisi fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, serta sarana dan prasarananya. Determinan faktor dalam konteks penanganan kawasan permukiman tidak

layak sangat signifikan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam prosesnya kemudian berdampak pada kondisi kawasan secara umum dan diidentifikasi akan memerlukan penanganan dari waktu ke waktu secara.

Kawasan permukiman kumuh adalah bagian dari wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dengan tingkat permasalahan secara khusus dan keberadaannya perlu untuk mendapatkan penanganan secara spesifik baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan sistem infrastrukturnya (Indrajaya *et al*, 2022). Pola penanganan terhadap kawasan permukiman tidak layak memerlukan kajian secara mendalam dan spesifik dalam kerangka mengurangi dan mengatasi permasalahan secara umum untuk kawasan permukiman tidak layak perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Kawasan pemukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang, merupakan salah satu kawasan pemukiman kumuh yang berada di Kabupaten Luwu. Kondisi pemukiman kumuh perkotaan tersebut yang ada di Kecamatan Walenrang, sebenarnya sudah terbentuk lama namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah membuat

kawasan pemukiman kumuh tersebut tidak terdeteksi dengan baik. Permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian masyarakat yang kondisi rumah yang tidak sehat dari sisi pencahayaan, jalan lingkungan yang memerlukan peningkatan, drainase lingkungan yang mengalami sedimentasi, sistem pengolahan persampahan yang masih temporer, sanitasi lingkungan yang belum memadai, dan sangat rentan terhadap ancaman kebakaran. Luas kawasan pemukiman kumuh perkotaan Batusitanduk 4,29 Ha, jumlah penduduk sebanyak 659 jiwa, dengan dominasi pemanfaatan lahan adalah pemukiman dan kegiatan ekonomi. Kawasan pemukiman kumuh nelayan Dusun Pantai Bahari penetapannya tertuang dalam SK. Bupati Kabupaten Luwu Nomor : 268/VI/2018 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Tanggal 4 Juni 2018 (Indrajaya *et al*, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

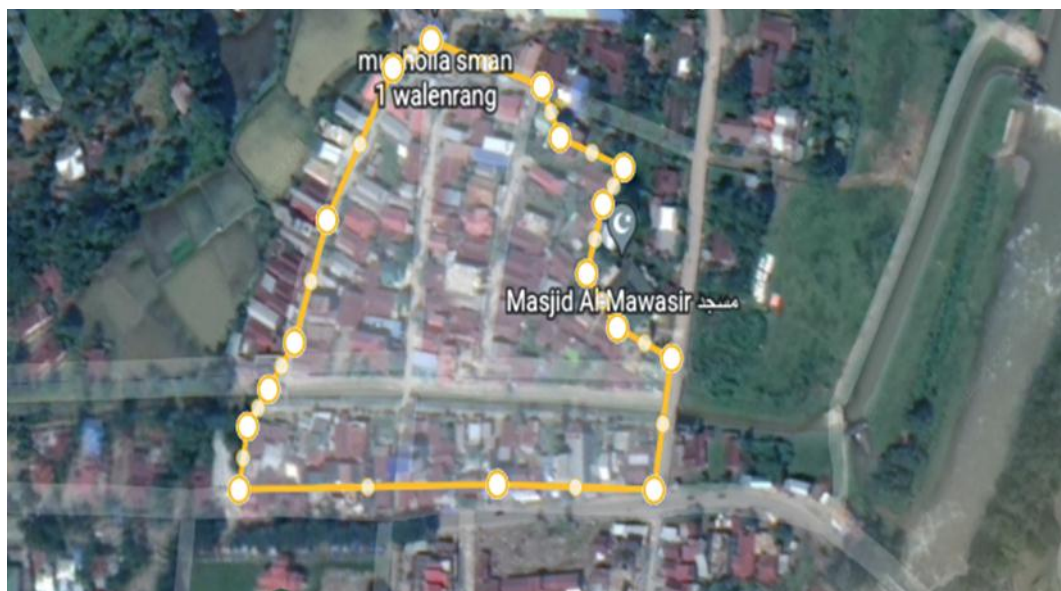
B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan teknik pengamatan lapangan. Pengamatan dilakukan dengan mengunjungi institusi pemerintah yang mencatat kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman terutama permukiman kumuh perkotaan. Data diperoleh dari catatan yang tersedia dan hasil wawancara dengan pejabat/petugas/individu yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di instansi teknis terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder yang kemudian dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang

memerlukan penanganan dan pengendalian tingkat kekumuhan yang mengakibatkan berbagai jenis permasalahan masyarakat. Penelitian ini berlangsung pada bulan Mei hingga Juni

2023. Gambar 1 adalah peta lokasi penelitian yaitu permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Data yang digunakan berupa data dokumentasi kinerja bidang Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Luwu. Data ini diperoleh dari instansi terkait yang relevan serta pustaka yang mendukung penelitian ini. Selain data sekunder juga digunakan data primer dari hasil wawancara dengan pejabat-pejabat lingkup Dinas Cipta Karya dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pejabat yang berwenang. Data ini berupa informasi kebijakan-kebijakan untuk mendukung pembangunan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh perkotaan

Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis data yang digunakan adalah metode pembobotan tingkat kekumuhan kawasan perkotaan (Indrajaya *et al*, 2022). Untuk menentukan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikelompokkan berdasarkan letak lokasi secara geografis (Ahaliki, 2020). Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran, di perbukitan, dan di daerah rawan bencana

(Crysta & Budisusanto, 2017). Selanjutnya penilaian dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap berbagai aspek yaitu kondisi kekumuhan, legalitas lahan, dan pertimbangan lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk berlokasi di Kecamatan Walenrang, luas kawasan 4,29 Ha. Tipologi kawasan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang terletak di dataran. Evaluasi tingkat kekumuhan permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk melibatkan 3 variabel, yakni evaluasi kekumuhan secara fisik, non fisik, dan legalitas lahan kawasan. Evaluasi kekumuhan secara fisik melibatkan 7 petunjuk di antaranya keadaan bangunan, keadaan jalan, keadaan drainase, keadaan pengelolaan air limbah, keadaan penyediaan air minum, keadaan pengelolaan persampahan, dan keadaan pengamanan kebakaran. Sedangkan secara non fisik melibatkan 5 petunjuk di antaranya strategi lokasi, potensi sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dukungan masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah. Sementara itu, evaluasi legalitas tanah melibatkan 3 petunjuk di antaranya

status tanah, persyaratan administrasi bangunan (IMB), dan kesesuaian RTR..

1. Penilaian Kekumuhan Secara Fisik

Untuk aspek kondisi bangunan meliputi (1) keteraturan bangunan, dimana sebanyak 65% bangunan tidak memiliki keteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak (Nilai bobot 3). (2) Kepadatan bangunan, dimana lokasi yang sempit dan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan kepadatan bangunan yang tinggi, jumlah kepadatan bangunan sebesar 400% unit/Ha (Nilai bobot 1). (3) Persyaratan teknis, dimana sebanyak 10% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis hunian (Nilai bobot 1). Untuk kondisi jalan yaitu (1) cakupan pelayanan, dimana 29% jalan lingkungan tidak memadai (Nilai bobot 1). (2) Kualitas jalan, dimana sebanyak 50% luas area jalan lingkungan dalam kondisi buruk (Nilai bobot 1). Untuk kondisi Drainase meliputi (1) cakupan pelayanan, dimana 96% sistem jaringan drainase telah memadai terhadap jalan lingkungan (Nilai bobot 5). (2) Kualitas drainase, dimana 90% sistem jaringan drainase dalam kondisi buruk dan belum memenuhi di area tersebut (Nilai bobot 5). Untuk kondisi penyediaan air bersih meliputi (1) Persyaratan Teknis, dimana sebagian besar wilayah Dusun Pantai

Bahari memiliki sistem penyediaan air bersih yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebesar 74% (Nilai bobot 3). (2) Cakupan pelayanan, dimana pelayanan penyediaan air bersih tidak memadai dengan jumlah populasi, cakupan pelayanan yang bersumber dari PDAM tau SPAM sebesar 26% (Nilai bobot 1). Untuk kondisi pengelolaan air limbah yang meliputi (1) Persyaratan teknis, dimana pengelolaan air limbah di Dusun Pantai Bahari tidak memenuhi syarat teknis, sebesar 3% (Nilai bobot 1). (2) Cakupan pelayanan, dimana sebesar 3% layanan pengelolaan air limbah tidak terpenuhi (Nilai bobot 1). Untuk pengelolaan persampahan yang meliputi (1) Persyaratan teknis, dimana pengelolaan persampahan di Dusun Pantai Bahari tidak memenuhi syarat teknis, sebesar 80% (Nilai bobot 5). (2) Cakupan pelayanan, dimana 82% layanan persampahan tidak terpenuhi (Nilai bobot 5). Sedangkan untu proteksi kebakaran, dimana 50% layanan proteksi kebakaran (Nilai bobot 3) dan 50% layanan jalan lingkungan tidak memadai (Nilai bobot 3)

2. Identifikasi Pertimbangan Lain

Tabel 1 Hasil Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan				
1		Keteraturan bangunan	51%-75% bangunan tidak memiliki keteraturan	3

Untuk nilai strategis lokasi terletak pada fungsi strategis kecamatan karena lokasi terletak di Ibu Kota Kecamatan (Nilai bobot 5). Sedangkan untuk aspek kepadatan penduduk, dimana Dusun Pantai Bahari memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, luas wilayah sebesar 4,29 Ha, hanya 2,9 Ha yang digunakan sebagai kawasan permukiman penduduk sedangkan 1,4 Ha di gunakan sebagai lahan empang, dengan jumlah penduduk sebesar 659 jiwa/Ha (Nilai bobot 1).dan untuk kondisi sosial ekonomi, dimana Dusun Batu Sitanduk memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dan perlu untuk dikembangkan misalnya terdapat pusat kegiatan perdagangan (Nilai bobot 5)

3. Legalitas Lahan

Pada aspek status lahan, keseluruhan lahan memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pribadi (Nilai bobot +1). Sedangkan untu kesesuain RTR, dimana Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR (Nilai bobot +1)

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai
	Kondisi Bangunan	Kepadatan bangunan	51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		Persyaratan teknis	25%-50% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupa pelayanan	51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		Kualitas jalan	25%-50% area memiliki kualitas permukiman jalan yang buruk	1
3	Kondisi Penyediaan air Bersih	Persyaratan teknis	51%-75% tidak dapat mengakses air bersih	1
		Cakupan pelayanan	25%-50% tidak terpenuhi air minum minimal	1
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidak mampuan mengalir	51%-75% terjadi genangan >30,cm>2jam dan >2x	5
		Ketidak tersediaan drainase	25%-50% tidak tersedia lingkungan	3
		Ketidak berhubungan	51%-75% drainase lingkungan tidak terhubung	3
		Drainase tidak terpelihara	51%-75% drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3
		Kualitas kontruksi drainase	51%-75% kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk	5
5	Kondisi Pengelolaan AIR Limbah	Persyaratan teknis	25%-50% sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		Cakupan pelayan	25%-50% sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Persyaratan teknis	76%-100% pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
		Standar teknis	76%-100% sistem persampahan tidak sesuai standar	5
		Tidak terpelihara	76%-100% sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Persyaratan teknis	76%-100% tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		Cakupan pelayanan	51%-75% jalan lingkungan tidak memadai	3
		Ketidak tersediaan sarana	25%-50% tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1
Jumlah Bobot				52
8	Pertimbangan Lain	Nilai strategi lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategi kabupaten/kota	5
		Kependudukan	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151-200 jiwa/Ha	1
		Kondisi sosial ekonomi dan budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau di pelihara	5
Jumlah				11
B. Identifikasi Legalitas Lahan				
1	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Keseluruhan Lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+1)
		Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+1)
Jumlah				(+2)

Sumber: Hasil Analisa Data 2023

Dari Tabel 1, menunjukkan bahwa permukiman kumuh perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori kumuh sedang dengan nilai indikator 52. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi pengendalian Penataan kawasan permukiman kumuh yang dapat dilakukan dengan berbagai strategi yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan kualitas. Strategi pencegahan yang terdiri dari: peningkatan kapasitas, pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi peningkatan kualitas terdiri dari: pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi), dan permukiman kembali (relokasi) (Reza *et al*, 2017).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Tifologi daerah pemukiman kumuh (kumuh) perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan adalah permukiman kumuh yang berada di dataran. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan permukiman tak layak huni perkotaan Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kategori tak layak huni/kumuh sedang yang memerlukan penanganan dan pengendalian baik secara komprehensif maupun berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahaliki, B. (2020). Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jambura Journal of Informatics*, 2(2), 63-72.
- Amri, N. (2013). Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Jupiter*, 12(1), 1-10.
- Crysta, E. A., & Budisanto, Y. (2017). Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C388-C392.
- Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena kemiskinan perkotaan (urban poverty) di Yogyakarta: Suatu kajian struktur dan respons kebijakan. *Jurnal UNY*, 1-15.
- Indrajaya, I., Rusida, R., & Baharuddin, A. F. (2022). Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 136-146.
- Indrajaya, I., Rusida, R., Baharuddin, A. F., & Ermayanti, E. (2022). Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Nelayan Dusun Pantai Bahari Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(3), 532-540.
- Noverina, M. (2017). Fenomena urbanisasi dan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 103-124.
- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117-127.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1-23.

Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.